



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VI DPR RI**

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 14 (Empat Belas)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II
Hari, Tanggal	: Senin, 3 April 2023
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka, atas kesepakatan Rapat selanjutnya Tertutup
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai Aksi Korporasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tentang Penataan B2C dan B2B di PT Telkom Group;
Hadir	: 1. Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Wakil Menteri BUMN II, Saudara Kartika Wirjoatmodjo; dan 3. Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Saudara Ririek Adriansyah; Beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI dan berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat (1), Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II pada pukul 11.00 WIB dan Rapat dinyatakan terbuka, namun atas kesepakatan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI serta Wakil Menteri BUMN II, maka Rapat Kerja dilanjutkan secara tertutup;

2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 3 April 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mendukung rencana aksi korporasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., tahun 2023 tentang penataan *Business to Consumer* (B2C) dan *Business to Business* (B2B) di Telkom Group yang diwujudkan melalui *Fixed Mobile Convergence* (FMC), sehingga dapat meningkatkan inovasi produk, layanan, dan loyalitas pelanggan, serta membuka ruang pertumbuhan bisnis baru sekaligus mendorong efisiensi pengelolaan secara grup, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memastikan pelaksanaan aksi korporasi Telkom Group agar:
  - a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pelanggan serta menjaga keberlangsungan kepentingan masyarakat Indonesia.
  - b. Mematuhi peraturan berusaha yang berlaku di Indonesia.
  - c. Meningkatkan kepemilikan Pemerintah selaku pemegang saham dwiwarna di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., atas PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).
  - d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terkait dengan perizinan yang diperlukan oleh Telkomsel dalam mewujudkan *Fixed Mobile Convergence* (FMC).
3. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### Catatan:

1. Terkait dengan rencana, timeline dan target aksi korporasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam FGD.
2. Terkait dengan review KPPU, agar disampaikan ke Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.05 WIB.

**WAKIL MENTERI BUMN II**

Ttd.

**KARTIKA WIRJOATMODJO**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA  
A-189**